



Pemda Perketat Ikat Pinggang



Pemda Perketat Ikat Pinggang

**Lanjutan Halaman 1

2025, belanja negara diatok Rp3.613,1 triliun. Terjadi defisit Rp616,2 triliun atau 2,5 persen dari PDB.

Pendapatan negara masih mengandalkan pajak dengan nominal Rp2.490,9 triliun.

Sementara penerimaan bukan pajak mencapai Rp505,4 triliun. Pemerintah dipastikan akan mengutang lagi menutupi defisit yang besar. Namun defisit masih jauh dari amanah UU sebesar 3

persen.

Kepala perwakilan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DjPB) Sulsel Supendi, menjelaskan APBN 2025 juga mengalokasikan dana untuk sejumlah program unggulan pemerintahan baru.

Makan bergizi gratis membutuhkan anggaran paling besar, yakni Rp71 triliun. Selain itu, ada renovasi sekolah dengan kebutuhan Rp20 triliun dan pembangunan sekolah unggulan terintegrasi dianggarkan Rp2 triliun.

Program lainnya, yakni penuntasan TBC Rp8 triliun. Selanjutnya pemeriksaan kesehatan gratis Rp3,2 triliun, lumbung pangan nasional, daerah, dan desa Rp15 triliun. Serta pembangunan RS lengkap berkualitas di daerah Rp1,8 triliun.

"Program-program ini akan menjadi fondasi bagi pembangunan berkelanjutan," kata Supendi, kemarin.

Sementara Kepala Portfolio Analytic Group PT Bahana TCV Investment Management Budi

Hikmat, menjelaskan pemerintah mesti fokus pada peningkatan daya beli masyarakat. Khususnya masyarakat kelas menengah. Menurutnya, kondisi saat ini berbeda dengan soft commodity booming tahun 2000-2012.

"Kini mining booming yang membutuhkan modal besar lebih menguntungkan kelompok ekonomiatas. Sementara itu, daya beli kelas menengah justru menurun," tegasnya.

Kebijakan fiskal di era

Presiden Jokowi, terutama setelah pandemi Covid-19, cenderung lebih banyak menopang kelompok masyarakat bawah melalui belanja bantuan sosial. Hal ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama 2024 yang lebih gegas, didorong oleh stimulus pemerintah.

Namun, di sisi lain, ia mengingatkan bahwa upaya Presiden Prabowo untuk memacu swasembada pangan dan memperbesar belanja sosial dapat memicu peningkatan defisit fiskal dan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Pemberian daya beli kepada masyarakat tanpa memacu produksi dalam negeri hanya akan meningkatkan risiko defisit transaksi berjalan dan pelemahan rupiah," tegasnya.

Penurunan daya beli kelas menengah, menurut Budi, merupakan sinyal penting yang tidak boleh diabaikan. Kelas menengah memiliki peran signifikan dalam menjaga stabilitas konsumsi

domestik. "Diperlukan pendekatan holistik yang tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan sosial, tetapi juga mendorong produktivitas dalam negeri, reformasi pajak, dan kebijakan fiskal yang lebih seimbang," tutupnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati optimis perekonomian tetap bangkit. Kondisi ekonomi 2024 yang positif kata Sri akan menjadi pijakan untuk akselerasi target pembangunan dan pertumbuhan ekonomi 2025.

Sementara itu, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk menjadikan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama dalam alokasi anggaran 2025. "Kita menempatkan pendidikan sebagai prioritas dan yakin melalui pendidikan dan pelayanan kesehatan inilah, jalan keluar sesungguhnya dari kemiskinan," jelas Prabowo.

Peringatan anggaran dikeluarkan pelaku usaha, terutama di sektor perhotelan. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran

Indonesia (PHRI) Sulsel Anggiat Sinaga, mengungkapkan kebijakan ini berdampak langsung pada tingkat hunian hotel. Kegiatan pemerintah selama ini menyumbang sekitar 40-60 persen okupansi hotel.

Dampak inidiak hanya dirasakan oleh industri perhotelan, tetapi juga oleh rantai pasok, seperti vendor bahan makanan dan minuman. Penurunan permintaan menyebabkan tekanan besar pada pelaku usaha kecil dan menengah di sektor ini.

"Industri perhotelan memiliki rantai pasok yang panjang. Jika kegiatan pemerintah menurun, otomatis kebutuhan bahan makanan dan minuman juga ikut berkurang. Ini sangat memengaruhi pemasok lokal," tambahnya.

Para pelaku usaha meminta pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan yang berdampak langsung pada sektor ekonomi. Menurut mereka, efisiensi anggaran tetap harus diimbangi dengan dukungan terhadap keberlanjutan bisnis. (*)